TREND ASIA WALHI JAMBI

PLTU JAMBI UNTUK SIAPA?

JAMBI TIDAK MEMERLUKAN PLTU MULUT TAMBANG 1 DAN 2

PLTU JAMBI UNTUK SIAPA?

JAMBI TIDAK MEMERLUKAN PLTU MULUT TAMBANG 1 DAN 2

FEBRUARI 2024

Penulis

Tim Walhi Jambi

Editor

Ahmad Ashov Birry

Zakki Amali

Kontributor

Tim Trend Asia

Publikasi oleh :

Trend Asia

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Jambi

Daftar Isi

I.	Latar Belakang	1.
II.	Kebijakan PLTU Mulut Tambang Nasional	3.
III.	PLTU Mulut Tambang di Provinsi Jambi	5.
IV.	Pembangunan PLTU Mulut Tambang Jambi 1 dan 2	6.
V.	Dampak PLTU Eksisting di Jambi	11.
VI.	Ancaman Bencana Sosial Ekologi Di Jambi Akibat Pembangunan PLTU MT 1 dan 2	13.
VII.	PLTU MT Jambi 1 dan 2 Untuk Siapa?	15.
VIII.	Investor Meninggalkan Pendanaan PLTU MT Jambi 1-2?	16.
IX.	Rekomendasi	17.

Foto : Ginda Bahari

I. Latar Belakang

Provinsi Jambi memiliki luas wilayah 49.026,576 km² yang berbatas dengan Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Bengkulu, yang didiami oleh lebih dari tiga juta jiwa.[1] Pemenuhan kebutuhan listrik Provinsi Jambi disokong oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui sistem kelistrikan yang telah tersambung dengan sistem interkoneksi Sumbangselteng melalui saluran transmisi 150 kV.[2]

Grafk
Kapasitas PLN

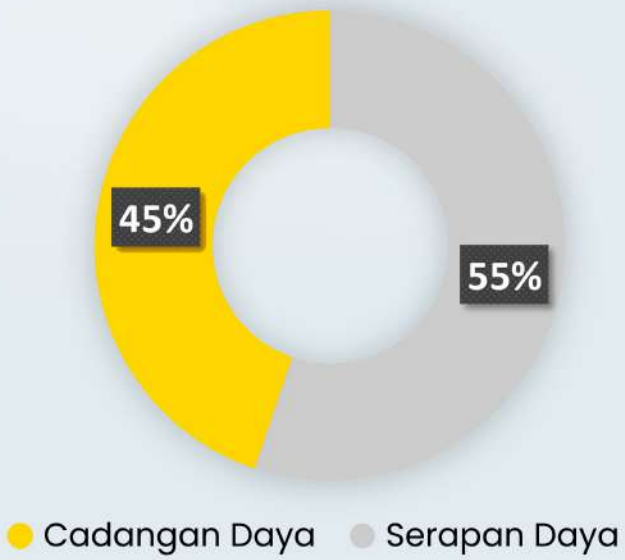

Dalam statemen yang dikutip dari berbagai sumber, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumsel, Jambi dan Bengkulu (UIW S2JB), Daryono, Jumat (6/3) menyampaikan, kapasitas pembangkit yang dimiliki PLN saat ini sebesar 2.415 Mega Watt (MW), sedangkan daya yang diserap oleh masyarakat baru sebesar 1.333 MW. Dengan kondisi ini, maka PLN masih memiliki cadangan daya yang cukup besar yakni 1.082 MW atau 81 persen.[3] Hal ini menunjukkan oversupply pasokan listrik di wilayah tersebut yang akhirnya membebani keuangan negara karena kontrak listrik dilakukan dengan skema take or pay (TOP).

Selain itu Provinsi Jambi juga dikenal sebagai salah satu provinsi yang memiliki cadangan batubara yang besar, hal ini dibuktikan dengan banyaknya konsesi tambang batubara di sana. Setiap tahun selalu mendapatkan kuota produksi dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan jumlah yang cukup besar, tahun 2023 mencapai 36,5 juta ton.[4] Rata-rata batubara ini di distribusikan keluar provinsi Jambi untuk memenuhi pasokan permintaan untuk kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara hingga industri.

1. Provinsi Jambi Dalam Angka 2023
2. Dokumen RUPTL 2021 - 2030 hal. A-73
3. Diolah oleh Walhi Jambi dari berbagai sumber media
4. https://www.jambiupdate.co/read/2023/09/17/108693/segini-produksi-batu-bara-di-jambi-hingga-agustus-2023-jauh-dari-harapan

Kini dampak batubara tidak hanya dirasakan di sisi hulu maupun hilir dari penggunaan, timbul permasalahan baru di sisi distribusi batubara khususnya yang terjadi di Jambi. Aktivitas pengangkutan batubara menimbulkan permasalahan antara lain, keberadaan truk yang lalu lalang menggunakan jalan provinsi telah memicu kemacetan setiap hari. Selain itu truk yang bermuatan puluhan ton ini mengancam keamanan pengendara lainnya karena harus berbagi jalan. Bahkan pernah terjadi kemacetan "horor"selama 22 jam yang mengakibatkan seorang pasien meninggal dunia di dalam ambulans.[5]

Tak heran masalah ini timbul, jumlah kendaraan angkutan batubara tercatat mencapai 12.123 unit.[6] Jumlah kendaraan angkut yang begitu banyak ditambah dengan belum adanya infrastruktur khusus yang memadai. Masalah tidak berhenti sampai disitu, dampak lainnya ialah debu dari pengangkutan ini berpotensi mengakibatkan gangguan kesehatan bagi masyarakat yang dilewati oleh kendaraan tersebut.

Terdapat sebuah rencana pembangunan PLTU mulut tambang (MT) di Jambi. Definisi PLTU MT adalah PLTU yang memiliki sumber batubara di dekatnya berjarak 20 kilometer dari wilayah izin usaha tambang.[7] Dengan adanya PLTU MT akan membuat jumlah angkutan batubara menjadi lebih banyak, karena batubara kemungkinan akan tetap diangkut dari tambang ke PLTU memakai truk. Jadi mulut tambang di sini tidak berarti sumber batubara berada dalam satu kawasan dengan pembangkit. Dampak dari rencana pembangunan PLTU MT yang dikhawatirkan di masa depan adalah adanya deretan lubang tambang batubara, hingga masalah angkutan batubara menjadi ancaman serius bagi warga Jambi. Jika masalah ini dibiarkan terjadi, maka generasi masa depan Jambi hanya akan diwarisi dengan kerusakan lingkungan.

Foto :Aleksey Zhilin

5. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230302154911-4-418385/horor-macet-di-jambi-telan-korban-jiwa-kemenhub-buka-suara
6. Id footnote 4

Foto : KOMINFO Jatim

II. Kebijakan PLTU Mulut Tambang Nasional

Penambahan pembangkit listrik di wilayah Kalimantan dan Sumatera diprioritaskan menggunakan prinsip resources base atau penambahan pembangkit listrik dengan menggunakan sumber energi yang terdekat, dalam hal ini adalah penggunaan batubara yang dekat dengan mulut tambang, menurut pemerintah kedua wilayah ini memiliki potensi batubara yang cukup besar. Total rencana pembangunan PLTU MT mencapai 3,3 GW yang berada di wilayah Kalimantan dan Sumatera.[8] Beberapa provinsi yang diusulkan untuk dibangun PLTU MT diantaranya Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah.[9]

Rencana pembangunan PLTU MT dihadirkan untuk mengatasi masalah terbatasnya pasar untuk batubara low-rank atau batubara kalori rendah yang jumlahnya sangat banyak dan masih minim untuk dimanfaatkan. Pulau Sumatera dan Kalimantan diperkirakan memiliki jumlah batubara low-rank yang paling banyak mencapai 63,76 miliar ton dan 61,18 miliar ton.[10]

Terdapat beberapa instrumen perangkat hukum untuk memberikan jaminan kepastian dan kemudahan PLTU MT. Di antaranya, Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara untuk pembangkit listrik mulut tambang yang mengatur prinsipnya didasarkan pada:[11]

a. Penggunaan batubara yang secara ekonomis lebih layak dipakai untuk pembangkit tenaga Listrik mulut tambang;
b. Ketersediaan batubara yang dijamin oleh perusahaan tambang selama masa operasi;
c. Lokasi pembangkit berjarak paling jauh 20 kilometer dari wilayah IUP, IUPK, atau PKP2B; dan
d. Tidak memperhitungkan biaya transportasi batubara kecuali biaya transportasi dari lokasi tambang sampai lokasi fasilitas penyimpanan (stockpile) pembangkit listrik mulut tambang

8. Dokumen RUPTL 2021 - 2030 hal. V-51
9. Id Dokumen RUPTL 2021 - 2030 hal. III-48
10. https://jurnal.tekmira.esdm.go.id/index.php/minerba/article/view/1222/963
11. Permen ESDM Nomor 9 tahun 2016

Terdapat juga jaminan atas pembelian tenaga listrik yang dihasilkan dari PLTU MT akan dibeli berdasarkan PJBL (Perjanjian Jual Beli Listrik) oleh PLN setidaknya untuk jangka waktu 30 tahun terhitung sejak COD sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara Untuk Pembnagkitan Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (*Excess Power*).

Dalam RUPTL 2015 - 2024 salah satu provinsi yang diusulkan untuk dibangun PLTU MT ialah Sumatera Selatan, dengan total kapasitas mencapai 3.000 MW.[12] Misalnya, PLTU MT Sumsel-8 berkapasitas 2x660 MW diklaim menjadi PLTU MT terbesar di Asia Tenggara[13] yang telah resmi beroperasi pada Oktober 2023.[14]

Rencana penambahan PLTU baru yang tersebar di beberapa wilayah selain Sumatera Selatan, dinilai kurang tepat dan terlalu dipaksakan karena saat ini pasokan listrik Indonesia telah mengalami kelebihan atau oversupply hingga 40%. Data PLN mencatat bahwa Pulau Kalimantan mengalami kelebihan pasokan listrik paling besar mencapai 67% disusul Pulau Jawa-Bali 47%, Pulau Sumatera 40%, dan Sulawesi bagian Selatan mencapai 31%.[15]

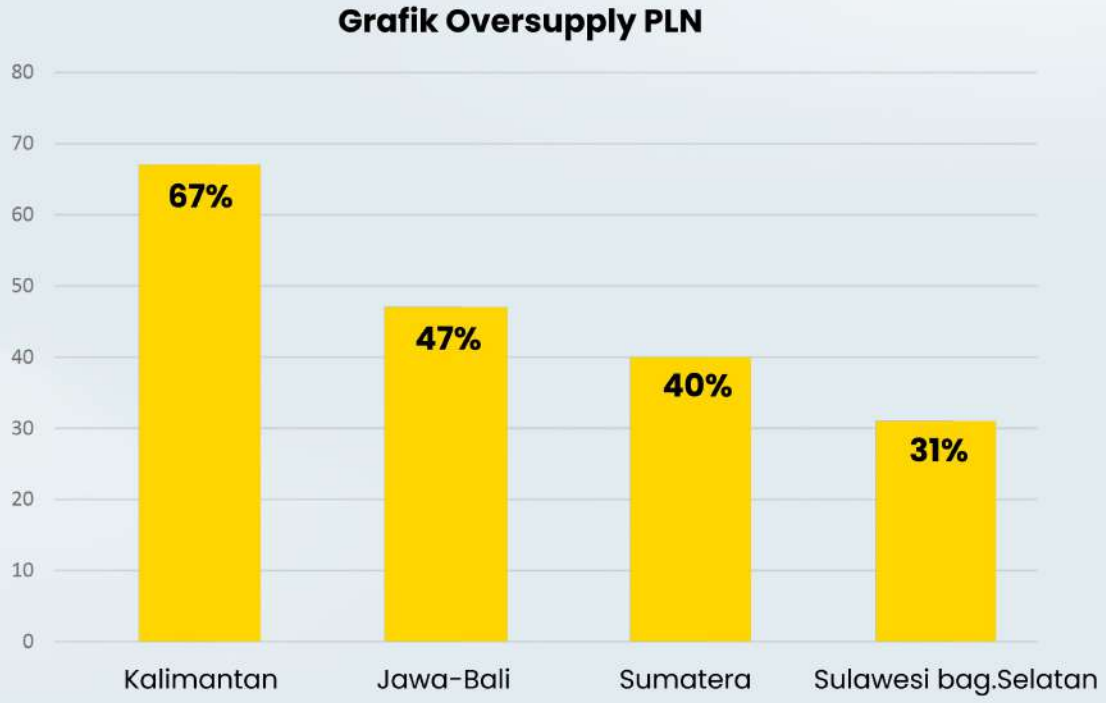

Saat ini desakan untuk mengedepankan penggunaan energi terbarukan sebagai salah satu upaya untuk menurunkan pelepasan emisi dari penggunaan energi kotor seperti batubara.Indonesia mau tidak mau harus mengikuti langkah tersebut, salah satu langkah yang dibuat oleh pemerintah adalah dengan menerbitkan peraturan baru melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Sayangnya, upaya menjauh dari batubara tersebut masih setengah hati, PP 112 tersebut masih mengizinkan pembangunan PLTU yang sudah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)--mengikuti RUPTL 2021-2030–untuk tetap dilanjutkan. Tercatat masih akan ada 13,8 GW tambahan kapasitas PLTU baru–termasuk PLTU MT –hingga 2029, dengan perkiraan pelepasan emisi karbon dioksida (CO_2) sekitar 86,9 juta ton tiap tahunnya atau setara dengan emisi karbon tahunan Nigeria.[16]

12. Id Dokumen RUPTL 2015 - 2024 hal. 99
13. https://finance.detik.com/foto-bisnis/d-5815200/ada-di-ri-ini-pltu-mulut-tambang-raksasa-di-asia-tenggara/6
14. https://www.cnbcindonesia.com/news/20231102092835-4-485719/sah-pltu-raksasa-sumsel-8-akhirnya-beroperasi
15. https://www.cnbcindonesia.com/news/20230208134534-4-412119/bukan-jawa-ternyata-ini-daerah-yang-listriknya-paling-luber
16. https://trendasia.org/gerakan-bersihkanindonesia-gugat-klaim-hijau-ruptl-2021-2030/

III. PLTU Mulut Tambang di Provinsi Jambi

Salah satu provinsi yang telah memiliki Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi adalah Jambi. Tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Jambi, dalam beleid tersebut Provinsi Jambi memiliki target penggunaan energi terbarukan sebesar 24% pada 2025 dan mencapai 40% pada 2050.[17]

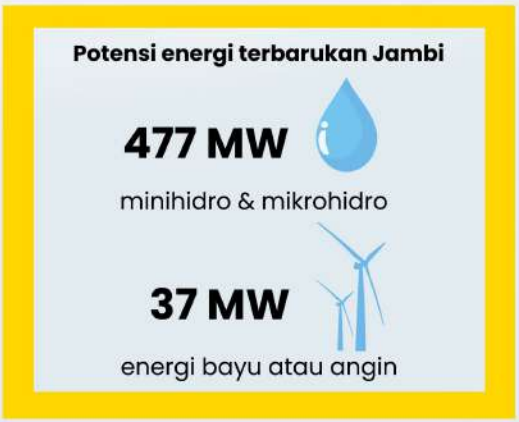

Meskipun demikian, saat ini kebutuhan energi khususnya untuk listrik Jambi pasokannya masih didominasi oleh penggunaan energi fosil sedangkan pemanfaatan energi terbarukan masih minim baru mencapai 15,29% dari jumlah yang ditargetkan.[18] Padahal kekayaan potensi sumber energi terbarukan yang dimiliki Jambi cukup besar di antaranya memiliki potensi tenaga air minihidro & mikrohidro mencapai 477 MW[19] , hingga energi bayu atau angin 37 MW.[20]

Dalam RUED Jambi penggunaan energi fosil seperti batubara setidaknya masih akan digunakan hingga 2050. Dalam rinciannya pasokan listrik untuk pemenuhan permintaan Provinsi Jambi masih akan memanfaatkan penggunaan batubara khususnya untuk PLTU MT. Ditargetkan pada tahun 2025 Jambi memiliki PLTU baru dengan total 1.212 MW; PLTU eksisting 12 MW serta penambahan PLTU MT Jambi 1 dan 2 hingga 1.200 MW.[21]

Awalnya untuk pemenuhan pasokan listrik, pengembangan tenaga listrik di Jambi pada RUPTL 2015-2024 direncanakan akan dipasok dari penambahan PLTU dengan total kapasitas 2 x 600 MW[22], namun seiring diperbaharuinya RUPTL usulan PLTU tersebut berganti menjadi PLTU MT dengan total kapasitas yang sama dalam RUPTL 2017-2026.[23] Hingga dalam RUPTL terbaru yang diklaim "lebih hijau" masih memasukkan PLTU MT Jambi 1-2 dengan target operasional pada 2027 untuk MT Jambi 1 dan 2027 untuk MT Jambi 2026 dengan kapasitas masing-masing 2 x 300 MW.[24] Selain itu, Kecamatan Pauh yang akan menjadi lokasi pembangunan PLTU MT Jambi 1 tengah menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang juga mengakomodir rencana penggunaan PLTU batubara di daerah tersebut.[25]

Hal ini semakin mempertegas arah pemenuhan pasokan listrik Jambi hingga puluhan tahun kedepan masih akan mengedepankan penggunaan energi kotor seperti batubara daripada pemanfaatan energi terbarukannya.

17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Jambi
18. Data Dinas ESDM Provinsi Jambi
19. Dokumen RUPTL 2021 - 2030 hal. A-77
20. Id footnote 17
21. Id footnote 16
22. Dokumen RUPTL 2015 - 2024 hal.232
23. Dokumen RUPTL 2017 - 2026
24. Dokumen RUPTL 2021 - 2030 hal. A-77
25. https://sarolangunkab.go.id/berita/baca/hadiri-penyusunan-ranperkada-rdtr-kecamatan-pauh-pj-bupati-sarolangun-bachril-bakri-sebut-investasi-pltu-capai-15-triliun

IV. Pembangunan PLTU Mulut Tambang Jambi 1 dan 2

Pada bulan Maret 2014, presentasi PLN menunjukkan pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas 800 MW di Provinsi Jambi, diproyeksikan mulai beroperasi pada tahun 2019 dan 2020. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), proyek tersebut merupakan proyek IPP (*Independent Power Producer*) atau pembangkit listrik swasta yang akan memanfaatkan cadangan batubara peringkat rendah yang tersedia secara lokal. Nantinya akan terkoneksi dengan jaringan listrik (grid) Pulau Sumatera.[26]

Rencana pembangunan PLTU MT Jambi 1 dengan kapasitas 2x300 MW akan berlokasi di Dusun 1, Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Desa Pemusiran memiliki luas wilayah 56.000 hektar, terdiri atas 26 RT dan 8 Dusun, dengan jumlah penduduk 1.300 kepala keluarga atau 6.800 jiwa. Di desa ini juga terdapat beberapa perusahaan penambangan batubara yang telah beroperasi, sebagai berikut:[27]

1. PT Surya Global Mandiri (SGM) dengan izin tambang seluas ± 3,000 hektar
2. PT Dinar Kalimantan Coal (DKC) dengan izin tambang seluas ± 2.000 hektar
3. PT Jambi Prima Coal (JPC) dengan izin tambang seluas ± 1.000 hektar
4. PT Inti Tirta dengan izin tambang seluas ± 25.000 hektar

Proyek PLTU MT Jambi 1 akan dikerjakan oleh PT Jambi Power, sebuah perusahaan konsorsium dari hasil patungan antara PT Indonesia Power (anak perusahaan PLN), PT Sumber Segara Primadaya (SSP), dan beberapa perusahaan lainnya.[28] Nilai investasi proyek ini ditaksir mencapai USD 1 miliar atau setara Rp 15 triliun (kurs Rp 15.000).[29] Berdasarkan informasi yang diperoleh, proyek ini akan mendapat pendanaan dari perusahaan BUMN dari China. Selain itu, proyek ini bagian dari program pemenuhan listrik 35.000 MW yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Perusahaan konsorsium ini telah melakukan pembebasan lahan pada tahun 2018 dengan mengakuisisi lahan milik PT Jambi Prima Coal (JPC), sebuah perusahaan batubara milik konglomerat asal India, seluas ± 1.000 hektar di Desa Pemusiran.

Lokasi tapak rencana proyek pembangunan PLTU MT 1 Jambi telah berdiri satu tiang pancang yang diresmikan oleh Bupati Sarolangun pada Februari 2018 sebagai penanda telah dimulainya pembangunan PLTU MT 1 Jambi.[30] Selain satu tiang pancang yang telah berdiri dan mulai keropos, masih ada empat tiang pancang lainnya yang belum ditancapkan. Selain itu, lokasi rencana pembangunan proyek ini dilewati oleh Sungai Sekamis dan sungai Selempado yang berdekatan dengan tempat penampungan (stockpile) PT SGM dan PT DKC. Keberadaan kedua sungai tersebut kini tidak bisa digunakan untuk diambil airnya untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar karena diduga sudah tercemar limbah tambang batubara.

26 https://gatrik.esdm.go.id/frontend/download_index/?kode_category=ruptl_pln
27 https://geoportal.esdm.go.id/minerba/
28 https://jambilink.com/jejak-kasus-pltu-riau-1-di-proyek-pltu-jambi-1/
29 https://jambiupdate.co/artikel-fantastis-pembangunan-pltu-di-sarolangun-telan-dana-hingga-rp14-triliun.html
30 https://jambi.antaranews.com/berita/323954/ground-breaking-pltu-di-sarolangun

Pembangunan PLTU MT 1

Tiang pancang rencana pembangunan PLTU MT Jambi 1 di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Sarolangun, Jambi

Menurut keterangan Kepala Desa Pemusiran, Bukhori, ada sekitar 14.700 hektare lahan akan dicadangkan lokasi batubara untuk PLTU MT Jambi 1 yang berada di wilayah Dusun Dam Siambang salah satu Dusun yang berada di wilayah administrasi Desa Pemusiran. Dusun ini dihuni oleh pendatang dari Sumatera Utara dan Jawa, dan rencananya dusun ini akan dimekarkan menjadi desa baru dan keluar dari Desa Pemusiran.

Kebutuhan batubara PLTU ini 3,7 juta ton/tahun atau mencapai 10.200 ton/hari atau tiap jam nya akan membakar sebanyak 425 ton yang akan menggunakan *Pulverised Firing* (PC) dan *Circulating Fluidised Bed Combustion* (CFB), nantinya batubara tersebut akan dipasok dari PT SGM.[31] Perusahaan tambang ini telah memiliki IUP dengan luas konsesi tambang yang dimiliki mencapai 2.600 hektare, yang terletak di desa yang sama dengan rencana proyek pembangunan pltu tersebut. PT SGM juga tercatat sebagai perusahaan batubara satu grup dengan PT Jambi Prima Coal.[32]

Keberadaan PT Jambi Power yang merupakan konsorsium PLTU Jambi 1 sulit dilacak, kantornya di Jambi pun sulit ditemukan. Namun, diketahui Direktur PT Jambi Power adalah Ahmad Ilham Rasyid, yang merupakan seorang pengusaha di bidang energi, pernah tercatat sebagai Vice President Director PT Bosowa Energi dan juga tercatat sebagai Dirut PT SSP.[33]

Dari evaluasi AMDAL yang dilakukan oleh *Center for Research on Energy and Clean Air* (CREA), ditemukan beberapa kekurangan diantaranya sebagai berikut:[34]

1. Standar emisi udara yang digunakan masih mengacu pada Permen tahun 2008 yang telah usang, padahal seharusnya mengacu atau menselarkan pada standar emisi yang terbaru sesuai dengan Permen LHK nomor 15 tahun 2019 karena AMDAL tersebut diserahkan pada 2019

31. Dokumen AMDAL PLTU MT Jambi 1.
32. https://jambilink.com/jejak-kasus-pltu-riau-1-di-proyek-pltu-jambi-1/
33. Idem footnote 27
34. https://energyandcleanair.org/publication/health-economic-impact-jambi-1-indonesia

2. Standar emisi udara yang digunakan masih mengacu pada Permen tahun 2008 yang telah usang, padahal seharusnya mengacu atau menselarkan pada standar emisi yang terbaru sesuai dengan Permen LHK nomor 15 tahun 2019 karena AMDAL tersebut diserahkan pada 2019

Dari hasil temuan di lokasi pembangunan PLTU MT 1 Jambi juga, tim WALHI Jambi bersama Centre For Research on Energy and Clean Air (CREA), berhasil memproyeksikan munculnya dampak buruk akibat pembangunan PLTU MT 1 Jambi, khususnya terkait dengan hilangnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dimandatkan dalam UUD 45 Pasal 28 H yang akan dialami oleh masyarakat Desa Pemusiran dan masyarakat yang berada disekitarnya.

Pembangunan PLTU MT 2

Menurut cerita dari Thamrin, Sekretaris Desa Lubuk Napal, bahwa Lubuk Napal merupakan pecahan dari Dusun Bawaraman yang mencakup wilayah Sepintun, Lamban Sigatal, dan Lubuk Napal. Sekitar tahun 1990-an Lubuk Napal ditetapkan sebagai desa. Luas Desa Lubuk Napal 15.000 ha atau 150 km² dengan jumlah penduduk mencapai 1.569 jiwa dari 469 kepala keluarga, terdapat 8 RT dan 3 kepala dusun.

Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani sawit, karet, sebagian lainnya bekerja di tambang minyak ilegal dan tak lebih dari 30 orang kerja di tambang batubara. Perbatasan Desa Lubuk Napal sebagai berikut:

1. Utara : Desa Gurun Mudo
2. Timur : Desa Lamban Sigatal
3. Selatan : Desa Karang Mendapo
4. Barat : Danau Serdang

Lokasi yang akan dibangun PLTU MT-2 ini terdapat rumah penduduk.

Desa ini bakal menjadi lokasi tapak rencana proyek pembangunan PLTU MT 2 Jambi berkapasitas 2x300 MW. Proyek PLTU Jambi-2 akan dikembangkan oleh PT Pembangkitan Perkasa Daya, yang modalnya disokong China Huadian Group Corp 80% dan Nusantara Energy Limited 15% dan PT PP Energi 5%. Dalam rancangan Bappeda Kabupaten Sarolangun, PLTU Jambi-2 akan dibangun di KM 20-23 dengan luas lahan yang dicadangkan 150 ha. Lokasinya berada dalam izin konsesi PT Sinar Anugerah Sukses (SAS).

Untuk kebutuhan air, PLTU akan membangun saluran air menuju Sungai Batang Tembesi, melewati Desa Danau Serang. Dalam rancangan awal 2018, panjang pipa yang dibutuhkan 14 km dari KM 17 Lubuk Napal sampai Sungai Batang Tembesi.

Selain itu di desa ini terdapat beberapa sungai, sebagai berikut:

1. Sungai Sekamis
2. Sungai Kelampaian
3. Sungai Kelampaian kecil
4. Sungai Sekoserubuh
5. Sungai Rambutan
6. Sungai Sekomanggis
7. Sungai Polesmod
8. Sungai Telunan
9. Sungai Sirih

Dari beberapa sungai di atas, sungai yang akan sangat terdampak dari aktivitas pertambangan dan PLTU tersebut ialah Sungai Kelampaian Besar sampai Kelampaian Kecil yang berada di KM 23, dan Sungai Sekoserubuh yang berada di dalam kawasan izin PT SAS yang telah dibebaskan.

Di desa ini juga terdapat beberapa perusahaan batubara, minyak, sawit hingga HTI, sebagai berikut:

1. PT. Anugerah Jambi Coalindo (AJC) (perusahaan batubara)
2. PT. Sinar Anugerah Sukses (SAS) (perusahaan batubara)
3. PT. Hutomas Koado (perusahaan batubara)
4. PT. Kedaton (perusahaan sawit)
5. PT. APN
6. PT. Samhutani (HTI)
7. PT. Seliraya Merangin 2 (milik Pertamina)
8. PT. Sumber Cahaya Mineral

Lokasi PT AJC, yang rencananya akan menjadi supplier batubara untuk PLTU MT-2

China Huadian diketahui telah menandatangani perjanjian jual beli listrik dengan PLN dan berkomitmen untuk mengembangkan PLTU Jambi-2 berkapasitas total 2x300MW dengan basis Build, Own, Operate, Transfer (BOOT) dengan masa operasi selama 25 tahun menggunakan teknologi *supercritical*.[35] Sementara, China Energy Construction Southwest Design Institute disebut telah memenangkan tender untuk survei dan kontrak desain. Berdasar pada perjanjian Mei 2019, proyek ini akan dibuat menjadi dua unit dengan menggunakan teknologi *supercritical*, akan ada pembangunan jalur transmisi 500 kV sepanjang 118 km, dan tambang batubara dengan kapasitas produksi 3,1 juta ton/tahun. PLTU ini nantinya akan menyediakan listrik sebesar 4,9 juta kWh per tahun dan dari RUPTL 2021-2030 PLTU ini direncanakan COD pada 2026.[36]

Batubara untuk PLTU ini akan disuplai dari PT Sinar Anugerah Sukses (SAS), PT Anugerah Jambi Coalindo (AJC), dan PT Bakti Sarolangun Sejahtera (BSS), yang telah memiliki konsesi batubara di Kecamatan Pauh. Ketiga perusahaan tersebut dimiliki oleh PT Artha Nusantara Mining (99,75%) dan PT Artha Nusantara Resources (0,25%).

Warga RT 06 Desa Lubuk Napal di KM 20 yang paling akan terdampak pembangunan PLTU Jambi-2. Saat ini mereka menempati rumah dan tanah yang sudah dibeli oleh PT. SAS, ada sekitar 40 kepala keluarga yang menumpang tinggal di lahan perusahaan. PT SAS telah mendapatkan izin konsesi seluas 1.282 ha sejak 2008. Tidak lama setelahnya PT SAS mulai membebaskan lahan masyarakat lewat jual beli. Minimnya sosialisasi akan proyek tersebut membuat rata-rata warga dan perangkat desa yang ditemui tidak tahu dampak buruk yang akan ditimbulkan dari pembangunan tersebut.

Rencana Target Pembangunan PLTU MT 2

Perencanaan pembangunan proyek ini telah dimulai sejak 2011-2012, masuk fase tender pada 2013, penandatangan kontrak pada 2014, dan mulai pembebasan lahan pada 2014-2015, fase konstruksi akan dimulai 2015 dan target mulai beroperasi pada 2018 atau 2019. Akan tetapi, sampai dengan Agustus 2015, rencana pembangunan pun belum dimulai hal ini dikarenakan belum ada kejelasan investor yang mendanai proyek tersebut. Pada bulan Oktober 2022, Huadian mengumumkan melalui Dewan Listrik Tiongkok bahwa mereka menarik diri dari proyek tersebut. Sampai dengan sekarang, proyek pembangunan PLTU Jambi-2 belum ada perkembangan berarti. Meski demikian, proyek ini masih masuk dalam RUPTL PLN 2021-2030.[37] Penarikan investasi PLTU baru dari China Huadian muncul pada Januari 2022 setelah Presiden China Xi Jinping mengumumkan pada September 2021 bahwa China tidak akan membangun PLTU baru di luar negeri.

Pernyataan China Huadian tersebut mendapat bantahan dari PLN. PLN menyatakan bahwa China Huadian masih mengembangkan proyek tersebut dan perjanjian jual-beli listrik antara kedua belah pihak masih berlaku. Dalam email pada bulan September 2023, PLN juga mengatakan bahwa proyek ini sedang menuju tahap penyelesaian finansial. China Huadian tidak menanggapi permintaan komentar untuk laporan ini dan juga tidak menjawab permintaan dari organisasi masyarakat sipil terkait perkembangan status proyek.[38]

35. https://m.in-en.com/finance/html/energy-2237299.shtml
36. Diolah oleh tim Walhi Jambi dari berbagai sumber terbuka
37. Diolah dari berbagai sumber terbuka
38.https://www.inclusivedevelopment.net/wp-content/uploads/2024/01/7603-IDI-Report-Blowing-Smoke-Bahasa-Translation-Digital-2.0-2.pdf

Penampakan bangunan PLTU Samaran, Jambi 2X7 MW dibangun pada tahun 2012 lalu

V. Dampak PLTU Eksisting di Jambi

Sebelum direncanakannya pembangunan PLTU mulut tambang, Provinsi Jambi telah lebih dulu memiliki PLTU non-mulut tambang yaitu PLTU Samaran dengan kapasitas 2x7 MW. PLTU ini dioperasikan oleh PT Permata Prima Elektrindo Coal Fire yang mulai beroperasi pada 2010. PLTU ini berada di Desa Samaran, Kecamatan Pauh, Kab. Sarolangun. PLTU ini menyuplai dua pertiga kebutuhan listrik dan menjadi motor utama hidup-matinya listrik di Kab Sarolangun.

PLTU ini berada tak jauh dari jalan lintas Sarolangun, atau berjarak sekitar 500 meter dari jalan. Dari jalan lintas, sudah terlihat mesin pembangkit dan cerobong PLTU dengan jelas. Tak jauh dari lokasi PLTU ini berderet rumah puluhan keluarga sepanjang jalan menuju PLTU. Tiap hari puluhan truk bermuatan batubara lewat depan rumah mereka, mengangkut ribuan ton batubara untuk mensuplai bahan bakar penggerak mesin PLTU tersebut.

Warga yang rumahnya berada dekat dengan PLTU telah melakukan penolakan sejak awal PLTU tersebut beroperasi pada 2010. Warga memblokade jalan masuk menuju lokasi PLTU, menuntut adanya kompensasi dari dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Berdasarkan penuturan Ramli (50), warga yang tinggal dekat PLTU menyampaikan bahwa, masyarakat telah merasakan dampak kesehatan dari operasional PLTU tersebut seperti batuk, sesak nafas, dan bahkan penyakit kulit. Beberapa tetangganya pun mengalami hal serupa yang juga mengeluh dampak dari debu batubara. Saat musim kemarau, partikel-partikel debu batubara paling terasa, debu hitam yang beterbangan membuat penampungan air bersih mereka tercemar.

Warga mengkhawatirkan dampak jangka panjang debu hitam batubara PLTU tersebut, terutama bagi anak-anak, "Yang kami takutkan cuma satu, yaitu anak-anak kecil kami," kata Ramli. Ketakutan orang tua seperti Ramli wajar, sebab dari beberapa riset menunjukkan bahwa moncong PLTU melepaskan polutan seperti PM 2.5, SO_2 dan NOx– kontributor utama pembentuk hujan asam, juga memancarkan merkuri dan arsen, bahan kimia berbahaya sekaligus mematikan. Polutan-polutan tersebut berukuran kecil, berbahaya bila terhirup, dan mudah menyebar mengikuti kemana arah angin bertiup dan mengotori udara.

"Yang kami takutkan cuma satu, yaitu anak-anak kecil kami,"

Ramli - Warga Desa Samaran

Di awal operasional PLTU tersebut, warga dikagetkan dengan suara gemuruh mesin ketika pertama kali dihidupkan. Suara itu kata Ramli, tak menentu, datang tak mengenal waktu, "Tapi kalau sekarang kami sudah terbiasa, cuma waktu pertama itu kaget suara gemuruh," ujar Ramli. Selain itu, warga yang tinggal di zona terdekat PLTU belum pernah menerima kompensasi, baik dari perusahaan maupun dari negara untuk biaya kesehatan. Dulunya kata Ramli, warga dijanjikan biaya cek kesehatan gratis, susu, dan uang Rp 300.000. Tapi itu hanyalah janji belaka, sampai sekarang warga tidak pernah mendapat sepeserpun kompensasi untuk biaya berobat.

Begitu pula dengan listrik warga juga masih membayar, "potongan 30% biaya tagihan listrik, kami juga tidak dapat," kata Ramli. Selain itu, perusahaan juga pernah berjanji akan memaksimalkan mempekerjakan tenaga kerja lokal dari desa, akan tetapi tidak juga terealisasi maksimal. Tak hanya itu, perusahaan juga menjanjikan pemasangan lampu penerangan beserta tiangnya di depan rumah warga, namun sampai belasan tahun kini sejak janji dilontarkan, lampu penerangan tersebut tak kunjung juga tegak berdiri.

Sejak belasan tahun mereka protes, kini seiring berjalannya waktu warga yang tadinya getol protes mulai mengendur perlawanannya. Warga semakin tak berani berbicara ataupun menuntut kepada perusahaan PLTU, salah satunya karena pernah ada upaya kriminalisasi. Begitu pula dengan pemerintahan desa yang juga mendukung terhadap rencana pembangunan PLTU tersebut, "Sekarang banyak warga memilih diam," ujar Ramli.

Meskipun PLTU Samaran masuk kategori PLTU kecil, namun tetap saja dampak yang ditimbulkannya sangat luar biasa. Tak terbayangkan daya rusak yang akan ditimbulkan jika PLTU MT dengan total kapasitas masing-masing 600 MW atau 86 kali lebih besar dari PLTU Samaran beroperasi di Desa Pemusiran dan Desa Lubuk Napal. Dampak negatif operasional PLTU yang dirasakan oleh warga Desa Samaran telah menjadi bukti nyata dan menjadi pelajaran penting bagaimana dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan PLTU, sudah seharusnya tidak ada lagi pembangunan PLTU baru di Provinsi Jambi.

VI. Ancaman Bencana Sosial Ekologi Di Jambi Akibat Pembangunan PLTU MT 1 dan 2

Berikut ancaman kerusakan lingkungan yang berpotensi terjadi jika PLTU MT Jambi 1-2 dipaksakan untuk dibangun:

1. Ancaman krisis air bagi masyarakat sekitar lokasi PLTU karena kebutuhan air baku untuk operasional yang sangat besar. Dari dokumen AMDAL PLTU MT Jambi 1 menyebutkan akan membutuhkan air sebanyak 36.000 m^3 yang akan diambil dari aliran sungai Desa Pemusiran.[39]

2. Sungai Sekamis dan sungai Selempado yang ada di Desa Pemusiran berpotensi tercemar akibat aktivitas pertambangan batubara dan akan tercemar berat bila PLTU MT Jambi 1 jika mulai beroperasi.

3. Terancam hilangnya Sungai Sekoserubuh akibat beroperasinya tambang batubara dan berpotensi merusak Sungai Kelampaian besar, Sungai Kelampaian kecil yang ada akibat aktivitas PLTU MT 2 di Desa Lubuk Napal.

4. Polusi udara berpotensi akan semakin parah bila operasional PLTU telah dimulai karena ada pelepasan polutan ke pemukiman warga Desa Pemusiran dan Desa Lubuk Napal karena lokasi PLTU yang berdekatan dengan pemukiman warga, hal ini akan memperparah dampak polusi udara yang telah ditimbulkan sebelumnya dari aktivitas pertambangan.

Sungai Sekamis di Desa Lubuk Napal dan Desa Pemusiran

Sungai Sekoserubuh yang berada di Desa Lubuk Napal

39. https://kilasjambi.com/ancaman-energi-kotor-pltu-mulut-tambang-jambi-1/

Sebagai contoh adalah Sungai Sekamis, melintas tepat di tengah-tengah pemukiman Desa Pemusiran, dari generasi ke generasi telah menjadi tumpuan aktivitas masyarakat sehari-hari seperti mandi, konsumsi, cuci, dan mengairi kebun masyarakat. Namun, interaksi tersebut mulai berkurang, hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung sungai akibat pembuangan limbah perusahaan eksploitasi batubara.

Dari hasil temuan tim WALHI Jambi di Desa Pemusiran, setidaknya ada tiga perusahaan batubara yang telah berkontribusi merusak kualitas Sungai Sekamis. Limbah batubara yang dibuang secara langsung ke badan sungai, tidak hanya mengakibatkan pendangkalan sungai, juga menurunkan kualitas air sungai. Hal ini mengancam hilangnya tumpuan masyarakat Desa Pemusiran dalam memenuhi kebutuhan harian mereka.

"Sungai Sekamis yang berada di desa kami, menjadi kekayaan alam yang diberikan oleh Tuhan kepada masyarakat Desa Pemusiran. Keberadaannya bukan hanya memberikan kemanfaatan dalam waktu pendek, namun telah kami rasakan dari anak dan cucu kami. Sehingga Sungai Pemusiran di desa kami, tidak bisa dipisahkan dari kami, karena keduanya saling membutuhkan" Datuk Sobar, salah satu tokoh adat masyarakat Desa Pemusiran kepada penulis.

Selain beberapa ancaman yang telah disebutkan diatas, analisis menggunakan sistem pemodelan yang dilakukan oleh Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) khususnya pada rencana PLTU MT Jambi 1 menunjukkan beberapa risiko, di antaranya sebagai berikut:[40]

1. PLTU ini akan meningkatkan konsentrasi pencemar udara ambien berupa PM 2.5, SO_2, NOx setiap tahunnya, serta pengendapan merkuri dan logam berat beracun lainnya yang dapat menyebabkan risiko penyakit dan gejala akut kronis khususnya pada masyarakat setempat

2. Jika PLTU ini beroperasi selama 30 tahun, diproyeksikan akan menimbulkan dampak kesehatan sebanyak 1.100 kematian dini, 680 kelahiran prematur, hingga hilangnya masa hidup selama 55.900 tahun akibat paparan polusi PLTU

3. Kerugian akibat dampak kesehatan yang ditimbulkan diproyeksikan akan meningkatkan biaya perawatan dan kerugian ekonomi setara dengan USD 640 juta atau sekitar Rp. 9,05 triliun selama masa operasi 30 tahun

Kondisi Sungai Sekamis dan sungai-sungai lainnya yang memburuk sekarang ini, diprediksi akan semakin memburuk seiring dengan pemerintah yang masih memaksa dibangunnya PLTU MT 1-2 di Jambi. Dampak kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dampak lingkungan, namun juga menimbulkan dampak kesehatan, hingga ekonomi yang dapat dihindari jika rencana pembangunan PLTU tersebut dibatalkan.

40. https://energyandcleanair.org/publication/health-economic-impact-jambi-1-indonesia

VII. PLTU MT Jambi 1 dan 2 Untuk Siapa?

Indonesia tercatat memiliki total sumberdaya batubara mencapai 143,7 miliar MT dan cadangan batubaranya mencapai 38,8 miliar MT pada tahun 2020, batubara kalori sedang dan rendah paling mendominasi.[41] Batubara kalori rendah diperkirakan paling banyak ditemukan di Pulau Sumatera dan Kalimantan mencapai 63,76 miliar ton dan 61,18 miliar ton.[42]

Mengingat potensi batubara kalori rendah cukup besar sehingga diperlukan upaya pengoptimalan penggunaan, salah satunya dengan memaksimalkan penggunaannya di dekat lokasi tambang dengan cara membangun PLTU MT. PLTU MT dinilai dapat menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) pembangkit, karena penggunaan batubara kalori rendah dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga batubara yang digunakan pada PLTU non-mulut tambang.[43] Hal ini juga menjadi alasan pengusulan pembangunan PLTU MT dengan total kapasitas mencapai 1.200 MW di Provinsi Jambi.

Kebutuhan batubara untuk mulut tambang sekitar 1,5 hingga dua kali lebih banyak dari PLTU non-mulut tambang , tentu angka ini melecut minat para pengusaha tambang,[44] khususnya bagi mereka yang batubaranya kebanyakan batubara berkalori rendah. Pemerintah pun telah mengatur harga jual batubara kalori rendah <3.800 kcal/kg dalam Kepmen ESDM nomor 7424.K/30/MEM/2016 dengan patokan harga cost+margin (sebesar 15-25% dari total biaya produksi). Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi perusahaan pertambangan yang mulai berbondong-bondong membidik pembangunan PLTU mulut tambang.

Dari data PLN pada tahun 2016, setidaknya terdapat sekitar 10 perusahaan swasta (IPP) yang mengajukan proposal pengembangan PLTU mulut tambang di Provinsi Jambi. Nama-nama perusahaan tersebut adalah :[45]

1. PT. Golden Energy Mines
2. PT. MNC Energy and Natural Resources
3. PT. BBM Mega Energi
4. PT. Jambi Lestari Power
5. PT. Pembangkitan Petra Daya
6. PT. Titan Multi Power
7. PT. Energi Indonesia Bersama
8. PT. Inti Tirta Primasakti
9. PT. Triaryani
10. PT. Globalindo Alam Lestari.

Perencanaan pembangunan PLTU MT tidak didasari atas pertimbangan lingkungan dan perlindungan terhadap masyarakat Provinsi Jambi. Pembangunan tersebut pada hakikatnya hanya untuk "menciptakan pasar" untuk menyerap hasil tambang batubara kalori rendah yang jumlahnya banyak dengan tetap mendapatkan keuntungan maksimal, yang keuntungan tersebut hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja.

Di tengah ketidakjelasan pembangunan, dalam acara "Panggung Rakyat" yang diselenggarakan oleh GESTUR, Gubernur Jambi yang hadir kala itu menyampaikan bahwa Provinsi Jambi akan fokus mengutamakan energi terbarukan, tidak akan melanjutkan agenda pembangunan PLTU MT Jambi 1-2.[46] Kini saatnya untuk menagih ucapan tersebut.

41. https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-buku-grand-strategy-komoditas-minerba.pdf
42. https://jurnal.tekmira.esdm.go.id/index.php/minerba/article/view/1222/963
43. Dokumen RUPTL 2021 - 2030 hal. V-51
44. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180719123945-85-315366/proyek-pltu-mulut-tambang-antara-efisiensi-dan-penyimpangan
45. Bahan Tayang Daftar Peminat IPP PLTU Mulut Tamabang, PT PLN (Satuan Pengadaan IPP), 2016
46. https://ltb.or.id/getDetailNews/80

VIII. Investor Meninggalkan Pendanaan PLTU MT Jambi 1-2?

Proyek yang dari awal dielu-elukan oleh pemerintah hingga hari ini masih belum dilakukan proses konstruksi padahal RUPTL 2021-2030 menargetkan PLTU MT Jambi 1 dan 2 dapat segera COD pada tahun 2026 dan 2027 setelah sebelumnya mengalami beberapa kali perubahan target COD. Bukan tanpa alasan kenapa pembangunan ini mundur bahkan tidak jelas statusnya, pasalnya hasrat investor telah hilang untuk mendanai proyek-proyek tersebut seperti yang terjadi pada PLTU MT Jambi 1[47] dan Jambi 2.

Pembangunan PLTU MT diperkirakan akan menelan biaya investasi yang besar. Laporan terbaru dari Inclusive Development International, Recourse, dan Trend Asia, menemukan hubungan pendanaan tidak langsung dari bank pembangunan multinasional yaitu International Finance Corporation (IFC), bagian dari World Bank ke proyek PLTU MT Jambi-2. Pada 2015, IFC berinvestasi ekuitas (saham) ke Postal Saving Bank of China sebesar USD 300 juta. Setelah menjadi klien IFC, Postal Saving Bank of China masih memberikan fasilitas pinjaman sampai batas tertentu yang dapat ditarik seperlunya (credit line) senilai USD 16 miliar kepada China Huadian Corporation. Masa waktu credit line ini masih berlaku hingga 2022. Postal Savings Bank juga telah menjadi penjamin (underwriter) lebih dari USD 1 miliar surat utang dan ekuitas China Huadian. Di sini tampak eksposur tidak langsung dari IFC ke proyek PLTU Jambi-2. IFC yang telah memiliki komitmen untuk tidak membiayai proyek batubara seharusnya juga ikut melakukan kontrol terhadap entitas perusahaan di mana IFC memiliki hubungan pendanaan.[48]

47. https://www.metrojambi.com/daerah/13547361/Pembangunan-PLTU-Terbesar-di-Sumatera-Belum-Terealisasi
48. https://trendasia.org/en/blowing-smoke-how-coal-finance-is-flowing-through-the-ifcs-paris-alignment-loopholes/

Tersiar informasi bahwa China Huadian menyatakan mundur dari pembangunan PLTU MT Jambi 2, seiring dengan momentum komitmen Presiden China Xi Jinping untuk tidak lagi membangun PLTU baru di luar negeri. Serta, masih belum diketahui bagaimana cara perusahaan ini akan meninggalkan perjanjian jual beli listrik yang telah disepakati bersama dengan PLN. Belum diketahui pula apakah perusahaan ini akan menjual sahamnya di proyek ini ke pihak lain atau tidak. Hal ini menunjukkan proyek ini mengalami ketidakjelasan pendanaan.[49]

Hilangnya hasrat investor untuk mendanai proyek kotor seperti PLTU mulut tambang seperti Jambi 1-2 menjadi bukti nyata bahwa proyek kotor seperti ini telah mulai ditinggalkan dan kedepannya akan semakin sulit untuk mendapatkan pendanaan. Para investor kini mulai mengalihkan pendanaannya pada pengembangan energi terbarukan sebagai upaya untuk menempuh pengurangan emisi gas rumah kaca, mengurangi dampak perubahan iklim, dan dapat mencapai Perjanjian Paris untuk dapat menahan laju suhu kenaikan global di bawah 1,5^{0}C.

Bukti-bukti empirik di atas seharusnya menjadi dorongan kuat kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengakhiri dari ketergantungan penggunaan energi kotor seperti batubara, tidak lagi membangun segala jenis PLTU baru, dan serius melakukan transisi energi berkeadilan menggunakan energi terbarukan termasuk di Provinsi Jambi.

IX. Rekomendasi

1. Pemerintah harus membatalkan rencana proyek Pembangunan PLTU MT Jambi 1 dan PLTU MT Jambi 2 dan mengeluarkannya dari dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mendorong potensi energi ramah lingkungan dan berkelanjutan di Jambi.
3. Mendesak semua institusi keuangan untuk menghentikan pembiayaan energi kotor dan tidak membiayai lagi proyek batubara.

49. Id footnote 43

Trend Asia
CEO Suite, AXA Tower 45th Floor
Jl.Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940

www.trendasia.org

WALHI Jambi
Jl. Wijaya Kusuma RT 24/16
Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo
Jambi – Indonesia 36125

www.walhijambi.or.id